



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola PT BPR Tridarma Putri Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Tridarma Putri selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Semarang, 19 Januari 2023

PT BPR Tridarma Putri

Disiapkan

I Wayan Suandi Adnyana, SE
Direktur Utama



Menyetujui

I Made Wardana, Adm, Ak
Komisaris Utama

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR TRIDARMA PUTRI
TAHUN 2022**



**Jl. Diponegoro no 25 Semarang
TELEPON: 0366 21203**



BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG- Good Corporate Governance) di PT BPR Tridarma Putri pada tahun 2022 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2022 di tengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan.

BPR Tridarma Putri memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga BPR Tridarma Putri dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Semarang. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Tridarma Putri didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Tridarma Putri.

BPR Tridama Putri telah beroperasi 53 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi Akuntabilitas Tanggung Jawab Independensi dan Kesetaraan. Hal ini di dorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendukung SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	I Wayan Suandi Adnyana, SE
	NIK	:	5105031711730001
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Direktur Utama bertanggung jawab atas kepengurusan perusahaan dan kerahasiaan bank. Menindaklanjuti temuan Audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR Audit Ekstern hasil pengawasan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya			
2.	Nama	:	Ni Luh Sri Arniti, SE
	NIK	:	5106017112630072
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan berwenang dan bertanggung jawab atas Operasional Bank dan Kepengurusan serta ketentuan yang berlaku. Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa keuangan dan Undang undang. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lainnya.			
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Penerapan tata kelola telah dilaksanakan secara konsisten. Tingkat kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. Direksi telah melaksanakan pengelolaan SDM sesuai rekomendasi Dewan Komisaris.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
-----	--



1.	Nama	:	I Made Wardana, Amd., Ak
	NIK	:	5107062206720001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan tanggung jawab : 1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. 3. Memberikan saran atau advice kepada direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. 4. Memastikan direksi telah menindak lanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern dan audit ekstern.			
2.	Nama	:	Drs. I Wayan Bagiastra
	NIK	:	5105031304510001
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
Tugas dan tanggung jawab : 1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. 3. Memberikan saran atau advice kepada direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. 4. Memastikan direksi telah menindak lanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern dan audit ekstern.			
Rekomendasi Kepada Direksi :			
Tugas dan tanggung jawab : 1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi. 2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank. 3. Memberikan saran atau advice kepada direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan. 4. Memastikan direksi telah menindak lanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern dan audit ekstern. 5. Sekala Prioritas penanganan NPL dan AYDA. 6. Selalu Mengupdate CBS agar bisa memenuhi aturan otoritas jasa keuangan dan peraturan pemerintah lainnya. 7. Mengupdate setiap ketentuan baru dari OJK dan dibuatkan ketentuan interen (SK).			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :



	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Nihil.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Nihil.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Nihil.			



B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Wayan Suandi Adnyana, SE	5105031711730001	Rp0,00	0%
2.	Ni Luh Sri Arniti, SE	5106017112630072	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan saham anggota direksi pada BPR Tridarma Putri tidak ada.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Wayan Suandi Adnyana, SE	5105031711730001	-	-	0%
2.	Ni Luh Sri Arniti, SE	5106017112630072	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota direksi tidak memiliki saham pada BPR lain dan perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Wayan Suandi Adnyana, SE	5105031711730001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ni Luh Sri Arniti, SE	5106017112630072	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Hubungan keuangan anggota direksi pada BPR Tridarma Putri tidak ada.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR



No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	I Wayan Suandi Adnyana, SE	5105031711730001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ni Luh Sri Arniti, SE	5106017112630072	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada hubungan anggota keluarga direksi pada BPR.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Made Wardana, Amd., Ak	5107062206720001	Rp0,00	0%
2.	Drs. I Wayan Bagiastra	5105031304510001	Rp770.000.000,00	30.8%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Terdapat kepemilikan saham pada anggota komisaris.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	I Made Wardana, Amd., Ak	5107062206720001	-	-	0%
2.	Drs. I Wayan Bagiastra	5105031304510001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak terdapat kepemilikan saham anggota komisaris pada perusahaan lain.					



E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Made Wardana, Amd., Ak	5107062206720001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. I Wayan Bagiastra	5105031304510001	Tidak ada	Tidak ada	I Ketut Estrada Adhi Saputra - Pemegang saham pengendali, Ni Kadek Ratmini - Pemegang saham pengendali, I Nyoman Agus Aryata - Pemegang saham
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Terdapat hubungan keuangan komisaris terhadap BPR.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	I Made Wardana, Amd., Ak	5107062206720001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Drs. I Wayan Bagiastra	5105031304510001	Tidak ada	Tidak ada	I Ketut Estrada Adhi Saputra - Keponakan, Ni Kadek Ratmini - Ipar, I Nyoman Agus Aryata - Keponakan
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Terdapat hubungan keluarga antara komisaris dengan pemegang saham.					



F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp299.700.000,00	2	Rp149.868.000,00
2.	Tunjangan	2	Rp209.922.892,00	2	Rp107.280.000,00
3.	Tantiem	0	Rp0,00	0	Rp0,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0,00	0	Rp0,00
Total			Rp509.622.892,00		Rp257.148.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Gaji yang didapat dari remunerasi berdasarkan RUPS.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan dinas (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas dewan komisaris dan dewan direksi sudah sesuai dengan RUPS. Untuk fasilitas kesehatan dewan direksi, direktur utama ditanggung 5 orang yaitu yang bersangkutan, 1 istri dan 3 anak, sedangkan untuk direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan ditanggung hanya 1 (yang bersangkutan saja). Untuk fasilitas kesehatan dewan komisaris yang ditanggung hanya komisaris utama 3 orang yaitu yang bersangkutan, 1 istri dan 1 anak.			



G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.23 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.43 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 April 2022	2	Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2022 Meliputi : Pembahasan kebijakan strategis yang sudah diambil , evauasi GCG ,manajemen risiko dan APU PPT
2.	25 Juli 2022	2	Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2022 Meliputi : Pembahasan kebijakan strategis yang sudah diambil , evauasi GCG ,manajemen risiko dan APU PPT
3.	27 Oktober 2022	2	Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2022 Meliputi : Pembahasan kebijakan strategis yang sudah diambil , evauasi GCG ,manajemen risiko dan APU PPT
4.	09 November 2022	4	Rapat Rencana Bisnis BPR th 2023 Meliputi : Pembahasan kebijakan strategis yang sudah diambil , evauasi GCG ,manajemen risiko dan APU PPT
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			



Terdapat rapat dewan komisaris sebanyak 4 kali dalam tahun 2022.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	I Made Wardana, Amd., Ak	5107062206720001	4	0	100%
2.	Drs. I Wayan Bagiastra	5105031304510001	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak ada.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama periode tahun 2022 tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, anggota dewan direksi anggota pegawai tetap dan anggota tidak tetap pada BPR Tridarma Putri.								



J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Nihil.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Nihil.									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Nihil.					



PT BPR Tridarma Putri
Jl. Diponegoro no 25 Semarang
Telepon: 0366 21203

Website: <https://www.bprtridarmaputri.co.id/>. Email: bpr_tridarmaputri@yahoo.co.id

Semarang, 19 Januari 2023

PT BPR Tridarma Putri

Disiapkan

I Wayan Suandi Adnyana, SE
Direktur Utama



Menyetujui

I Made Wardana, Adm, Ak
Komisaris Utama



HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT BPR Tridarma Putri
Alamat	: Jl. Diponegoro no 25 Semarang
Nomor Telepon	: 0366 21203
Posisi Laporan	: Desember 2022
Modal Inti	: Rp9.731.666.037,00
Total Aset	: Rp124.948.716.674,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Tridarma Putri Tahun 2022, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.9 dengan predikat Baik (2)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.28	0.256
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.72	0.258
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.1	0.21
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2	0.2
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.1	0.21
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.34	0.234
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2	0.15
10	Rencana Bisnis BPR	2	0.15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.85	0.139
Nilai Komposit			1.9
Peringkat Komposit			2
Predikat Komposit			Baik



B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.28)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah sesuai dengan ketentuan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.72)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris sudah sesuai dengan ketentuan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Tidak menerapkan Fungsi komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.1)

Tidak terdapat benturan kepentingan

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2)

Penanganan fungsi kepatuhan sudah sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

Penerapan Fungsi audit Intern sudah sesuai dengan ketentuan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penerapan Fungsi Audit Ekstern sudah sesuai dengan ketentuan.

8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.34)

Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian Intern perlu ditindak lanjuti dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2)

BMPK sudah sesuai dengan ketentuan.

10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 2)

RBB perlu dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1.85)

Transparansi Kondisi keuangan dan Non Keuangan sudah sesuai dengan ketentuan.



C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola adalah Bank senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik. Sedangkan dari sisi faktor negatif aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional BPR Tridarma Putri masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas

Selanjutnya, faktor positif aspek Proses Tata Kelola yaitu tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Sementara faktor Negatif aspek Proses Tata Kelola adalah BPR perlu untuk penyempurnaan Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari regulator dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional Bank yang terjadi pada saat ini.

Selanjutnya, dari sisi faktor positif aspek Hasil Tata Kelola bahwa Bank masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik. Kecukupan permodalan masih memadai, dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Sedangkan dari sisi aspek negatif aspek Hasil Tata Kelola yaitu selama tahun 2022 masih terdapat pengenaan sanksi terkait hasil pemeriksaan OJK.

Semarang, 19 Januari 2023

PT BPR Tridarma Putri

Disiapkan

I Wayan Suandi Adnyana, SE
Direktur Utama



Menyetujui

I Made Wardana, Adm, Ak
Komisaris Utama